

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu



Oleh:

DIAN IRMA DIANI

2009/13009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)**

Oleh :
Dian Irma Diani
13009 / 2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Januari 2014

Pembimbing 1


Lili Anita, SE, M.Si, Ak
Nip. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II


Henri Agunstin, SE, M.Sc, Ak
Nip. 19771123 200312 1 003

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)

Dian Irma Diani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : Dian_irma67@yahoo.com

ABSCTRACT

This study aims to test: (1) the influence of understanding of accounting on the quality of local government financial statement (SKPD). (2) The influence of the financial accounting information system utilization of local financial on the quality of local government financial statements. (3) The influence of the role of internal audit of the quality of local government financial statement.

This research is causative. The population is 28 SKPD in Government of Pariaman. The type of data is the primary data research. Methods of data collection is using questionnaires. The method of sample collection is using total sampling method . Data analysis techniques is using multiple linear regression.

The results of this study indicate: (1) the influence of understanding of accounting have significant positive effect on the quality of local government financial statements. (2) The influence of the use of financial accounting information systems of local financial on have not significant positive effect on the quality of local government financial statements. (3) The influence of the role of internal audit have significant positive effect of the quality of local government financial statements.

Suggestions for this study include: (1) for government to do review about the understanding of accounting, the financial accounting information system utilization of local financial, the role of internal audit in make financial statement which are increasing the quality of local government. (2) Subsequent research can expand the variables of study by adding other variables.

Key word: *quality of local government financial statement, the understanding of accounting, financial accounting system utilization, and the role of internal audit.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi adalah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Teknik Analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. (2) Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel penelitian dengan menambah variabel lain.

Kata kunci: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Swardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan

keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Yuliani (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Bastian (2010: 318) bahwa tahapan proses akuntansi meliputi transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat (*posting*) dan penerbitan laporan dan catatannya.

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu,

dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan, 2009) pelaksanaan akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tupoksi yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya.

Selain pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Saat ini SKPD telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem informasi tersebut dikenal dengan

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan SIKD dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas (Ahmad, 2008:428).

Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya peran internal audit. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat memberikan *keynote speech* pada lokalkarya Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat

membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Menurut *Institute Of Internal Auditor* (1999) dalam Yuliani (2010) disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan SAP dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar sudah menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semester II 2011 untuk 9 kabupaten/kota di Sumbar. Namun sejauh ini, belum satupun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semua daerah itu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), masing-masing Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, kota bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh (www.padangmedia.com)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009, 2010 dan 2011, untuk tiga tahun berturut-turut tersebut Pemerintah Kota Pariaman, BPK RI Perwakilan Sumbar memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti adanya

penurunan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2008, dimana Pemerintah Kota Pariaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain adanya inventarisasi aset seperti masalah tanah, persediaan barang dan aset yang belum adanya penilaian atas umur piutang, selanjutnya belum diterapkannya metode ekuitas dalam penyertaan modal pada perusahaan, masih banyaknya perjalanan dinas fiktif, keterlambatan penyetoran pajak, dll (www.antarasumbar.com). Bahkan pada tahun 2011 terungkapnya kasus korupsi atas pengadaan tanah untuk fasilitas olahraga yang melibatkan Walikota Pariaman, mantan Walikota Pariaman dan mantan Kabag Tata Pemerintahan Pariaman yang mengakibatkan kerugian negara 1,3 Milyar, ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan keuangan daerah di Pemerintah Kota Pariaman (www.padangekspres.com).

Penelitian Yuliani (2010) pada pemerintahan kota Banda Aceh bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011), yang meneliti mengenai penerapan sistem informasi keuangan daerah pada instansi pemerintah Kota Padang, dia menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Roviyantie (2011) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang kepada variabel kualitas laporan keuangan. Adapun beda dari penelitian sebelumnya yaitu dalam hal teknik pengambilan sampel dan tempat penelitian. Dimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliani (2010) pada Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitiannya menggunakan teknik *purposive sampling* dalam teknik pengambilan sampelnya sedangkan pada penelitian ini menggunakan *total sampling*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini penulis beri judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”**.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Sejauhmana pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Sejauhmana peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kota Pariaman, dapat menjadi masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Akademisi, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010 :KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Pemahaman Akuntansi

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara

perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Yuliani (2010) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun proses/siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2010: 318) adalah sebagai berikut:

1) Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

2) Analisis bukti transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3) Mencatat Data Transaksi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4) Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (*Posting*)

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan *posting*.

5) Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan Laudon, 2000).

Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah :“Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah”. Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup :

- 1) APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten ,dan kota,
- 2) Neraca daerah,

3) Laporan arus kas,

4) Catatan atas laporan keuangan daerah,

5) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

6) Laporan keuangan perusahaan daerah,

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan standar informasi keuangan daerah,
- 2) Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat,
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi,
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD,
- 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD,
- 6) Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi, dan
- 7) Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan:

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah,
- 3) Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah,
- 4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah,
- 5) Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat, dan
- 6) Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemanfaatan suatu teknologi sistem informasi yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur dari beberapa faktor berikut (Meuthia, 2008) dalam Gusforni (2011):

1. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna,
 2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna,
 3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.
- Dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi meliputi (Arief: 2008):
- a. Mempertinggi efektivitas
 - b. Menjawab kebutuhan informasi
 - c. Meningkatkan kinerja
 - d. Meningkatkan efisiensi

4. Peran Internal Audit (Inspektorat)

The Institute of Internal Auditor (1999) dalam Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah yang berada di bawah bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi Inspektorat adalah:

- 1) Mereview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 2) Menentukan kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah.
- 3) Mereview keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- 4) Mereview sistem yang digunakan untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan.
- 5) Mereview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah dan menverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut.
- 6) Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.
- 7) Mereview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 8) Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif.
- 9) Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

a. Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintahan

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

b. Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kabupaten-/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan intern di Kabupaten-/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur Dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

a. Melakukan Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi

Pengawasan intern dilakukan oleh inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah dengan tugas pokoknya antara lain:

1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a) Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggara pemerintah daerah
- b) Dikembangkannya sistem informasi evaluasi penyelenggara pemerintah daerah.

2) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a) Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkahnya untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
- b) ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelola keuangan daerah.

3) Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan SPI atas pengelola keuangan daerah oleh SKPD
- b) Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
- c) Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- 4) Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakannya pelaporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.
- b) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat.

b. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 peran inspektorat selaku internal audit pemerintah lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern selain sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, indikator kinerja inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern antara lain:

- a) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
- b) Sosialisasi SPIP
- c) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview.

Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) menyatakan bahwa, pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah kota Banda Aceh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011), yang meneliti mengenai Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang, dia menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Yenita (2010) meneliti mengenai pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan dan peran inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan SKPD. Sampel penelitian ini SKPD di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pejabat penatausahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan dan peran inspektorat mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan

keuangan dari pemerintah, karena kurangnya pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang belum optimal dan masih kurangnya peran internal audit dalam pemerintahan.

B. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Poerwadar-minta:2006).

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Yuliani (2010) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Banda Aceh, dia menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

b. Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ahmad (2008), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. dalam kerangka ini, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini menfokuskan peranan/pemanfaatan SIKD terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bagaimana SIKD tersebut berhasil atau diterapkan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, apa yang dimaksud kesuksesan dari sistem informasi tersebut dan bagaimana membuat sistem informasi tersebut menjadi sukses (jogiyanto, dalam fikri)

Astuti (2011) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat apabila masing-masing SKPD memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menduga bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Hubungan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi

yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya.

Yenita (2010) telah melakukan penelitian pada instansi pemerintah daerah kota padang, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki keandalan nilai informasi dipengaruhi oleh inspektorat sebagai internal audit. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menduga bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan adanya peran internal audit pada Pemerintah Kota Pariaman.

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan

itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

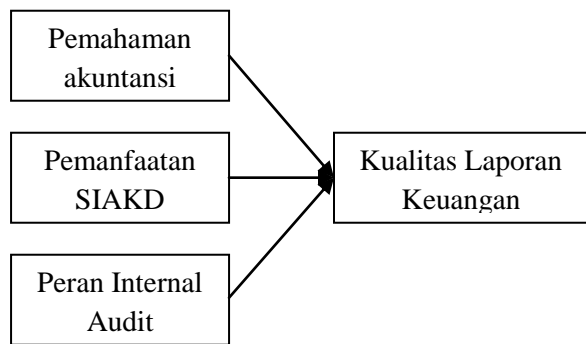
Pemahaman akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Untuk penyajian laporan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebagai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika kualitas sistem informasi berjalan dengan baik, maka semua proses akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem

dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi. Adanya peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Dalam hal ini peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:

- H₁ :Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman
- H₂ :Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah ber-pengaruh signifikan

positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman

- H₃ :Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Pariaman berjumlah 28 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf akuntansi pada SKPD. Alasan pemilihan responden adalah karena kepala bagian dan staf akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian ter-sebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi. jumlah responden 56 Responden.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada po-pulasi dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel antara lain:

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Variabel Eksogen dalam penelitian ini adalah:
 - a. Pemahaman akuntansi (X_1)
 - b. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2)
 - c. Peran internal audit (X_3)

Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Sebelum dibagikan kuesioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*), yang dilakukan pada 30 orang mahasiswa di fakultas ekonomi akuntansi. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item-total correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $n=30$ adalah 0,306.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (handal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Untuk uji reliabilitas digunakan pengujian *croanbach alpha* menurut Sekaran (2005), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6 – 0,7 akseptabel
- c. 0,7 – 0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov smirnov, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolienaritas

Untuk menguji adanya multikolienaritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) < 10 dan *tolerance* $> 0,10$. Jika *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10, maka terjadi multikolienaritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik ialah tidak terjadi heterokedastisitas.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah di-jawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{5SL+4SR+3PR+2KD+1TP}{\text{Jumlah responden}}$$

Dimana:

SL = Selalu

SR = Sering

PR = Pernah

KD = Kadang-kadang

TP = Tidak Pernah

Maka tingkat capaian responden (TCR) dihitung dengan:

$$TCR = \frac{\text{rata-rata skor}}{5}$$

2. Metode Analisis

a. Koefisien Determinasi (R_2)

Dilihat dari *adjusted R square* yang artinya seberapa besar kontribusi variabel terikat.

b. Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran

internal audi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Pariaman digunakan alat analisis regresi linear berganda.

Bentuk umum dari perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas laporan keuangan pemda

X1 = pemahaman akuntansi

X2 = Pemanfaatan SIAKD

α = Konstanta

β = Koefisien korelasi

e = Standar error

c. Uji F

Uji model yang dilakukan adalah dengan melakukan Uji F (*F Test*). Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan telah sesuai atau tidak. Uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linear berganda, dengan kriteria pengujian.

d. Uji t (Hipotesis)

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan.

Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah:

1. Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika $\text{sig} > \alpha$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak.

Definisi Operasional

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian,

perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

2. Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi keuangan daerah oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Peran Internal Audit

Adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Inspektorat selaku internal audit berperan dalam mewujudkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP pada masing-masing SKPD.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel dan Responden Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah dua puluh delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Setiap sampel masing-masing terdiri dari dua responden. Dari dua puluh delapan sampel tersebut, disebarkan sebanyak 56 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 50 kuesioner. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 50 kuesioner.

Hanya 89,29% diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu 17 Desember 2013 sampai dengan 2 Januari 2014.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006:182).

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada instrumen pemahaman akuntansi 0,716, untuk instrumen pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 0,901, untuk instrumen peran internal audit 0,905, dan untuk instrumen kualitas laporan keuangan pemerintah 0,770. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran 0,7. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 50$, adalah 0,235. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y adalah valid.

Untuk instrumen pemahaman akuntansi diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,238. Instrumen pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah nilai terkecil 0,613, instrumen peran internal audit nilai terkecil 0,447 dan untuk kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai terkecil sebesar 0,253.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal

Hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,257 dengan signifikan 0,085. berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil nilai VIF yang diperoleh menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Gletser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Berdasarkan Tabel, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

Hasil Penelitian

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat.

Dari tampilan *output* SPSS *model summary* besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,424. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 42,4%, sedangkan 57,6% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdektesi dalam penelitian ini.

2. Model estimasi regresi

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS 16.

Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat nilai *sig* sebesar $0,015 < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Pada tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 14,340 + 0,607X_1 + 0,039X_2 + 0,138X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas laporan keuangan
 X1 = Pemahaman Akuntansi
 X2 = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
 X3 = Peran Internal Audit
 e = Standar error

Angka yang dihasilkan dalam pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 14,340 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit adalah nol maka nilai pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar konstansta 14,340.

b. Koefisien regresi (b) X_1

Nilai koefisien variabel X_1 yaitu pemahaman akuntansi sebesar 0,607 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pemahaman akuntansi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,607 dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Koefisien regresi (b) X_2

Nilai koefisien variabel X_2 yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 0,039 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,039 satuan.

d. Koefisien regresi (b) X_3

Nilai koefisien variabel X_3 yaitu peran internal audit sebesar 0,138 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan peran internal audit satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,138 satuan.

3. Uji F (*F-Test*)

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan merupakan model tetap dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} atau membandingkan antara nilai sig dan $\alpha = 0,05$. Nilai F_{tabel} untuk $n = 50$ pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,79. Nilai F_{hitung} adalah 13,025 sedangkan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian, $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha$ 0,05.

4. Uji t (*t-test*)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n - k - 1 = 50 - 3 - 1 = 46$ adalah 2,013.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

a. Pemahaman Akuntansi (X_1) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,001 < \alpha$ 0,05 dan nilai t_{hitung} $3,607 > t_{tabel}$ 2,013. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,607. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa pemahaman akuntansi (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

b. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,778 > \alpha$ 0,05 dan nilai t_{hitung} $0,284 < t_{tabel}$ 2,013. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,039. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2) berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

c. Peran Internal Audit (X_3) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,011 < \alpha$ 0,05 dan nilai t_{hitung} $2,635 > t_{tabel}$ 2,013. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,138. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan peran internal audit (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

5. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

a. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi kepala sub bagian keuangan dan staf

akuntansinya, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan Roviyantje (2011), menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini mengungkapkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pemahaman akuntansi dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel tersebut berada pada kategori baik sehingga pemahaman akuntansi akan membantu dalam hal meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai TCR terendah yaitu 80,80% yang berarti aparatur pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menganalisis bukti transaksi dinilai baik. Nilai rerata pemahaman akuntansi dikategorikan baik dengan nilai TCR 87,69%. Dapat dikatakan pemahaman akuntansi aparatur pemerintah yang berada pada SKPD di pemerintah Kota Pariaman dikategorikan baik dan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pengaruh Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai $t = 0,284$ dan nilai signifikan $0,778$. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan teori yang dinyatakan Ahmad (2008) bahwa untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berada pada kategori baik. Tapi pada kenyataannya pemerintah dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah belum sepenuhnya dapat mempertinggi efektifitas, Menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya. Walaupun secara persepsi SKPD telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataan yang ada bahwa SKPD belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik.

Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Padahal SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian

dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah.

c. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yenita (2010), penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh peran inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki keandalan nilai informasi dipengaruhi oleh inspektorat sebagai internal audit.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel peran internal audit dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel tersebut berada kategori baik sehingga peran internal audit akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai TCR terendah yaitu 78,00% yang berarti Inspektorat punya komitmen terhadap kompetensi dinilai baik. Nilai rerata peran internal audit dikategorikan baik dengan nilai TCR 85,73%. Dapat dikatakan peran internal audit pada SKPD Pemerintah Kota Pariaman dikategorikan baik dan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman. (H_1 diterima).
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman. (H_2 ditolak).

3. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman (H_3 diterima).

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di kota Pariaman sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 42,4%. Sedangkan 57,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner serta kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan

- oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti penerapan Standar akuntansi pemerintahan (SAP), pengalaman kerja, pengawasan intern serta masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel penelitian, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.
 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden.
 4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arief, wibowo._____. *Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*. Jakarta.
- Astuti. 2012. *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat)*. Skripsi. FE UNP
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga
- Fikri, Miftahul. 2011. *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. UNP
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamdani, Sugita. 2011. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Pemerintahan Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia
- Jaksa Teliti Berkas Wako Pariaman. Melalui <http://www.padangekspres.com> [13/03/2013]
- James, A. Hall. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Jones, Gregory. Jeanot, Blanchet. 2000. *Assensing Quality Of Financial Reporting, Accounting Horizons*, Vol 14. Nomor 3.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Wajar Dengan Pengecualian. Melalui <http://www.antarasumbar.com> [13/03/13]

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Noerdiawan, Dedi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [16/09/2013]
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Melalui (www.google.com) [16/09/2013]
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Perangkat Daerah. Melalui (www.google.com) [16/9/2013]
- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Siliwangi
- Sawyer, Lawrence B, 2005. *Internal Auditing*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta
- Soemarso S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- Winidyaningrum, Celviana. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Jurnal SNA X111. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Yenita, Devi. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Daerah Di Kota Padang)*. Skripsi. FE UNP
- Yuliani, Syafrida. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Jurnal telaah dan riset akuntansi Vol 3 No 2 hal 206-220.
- Gusforni, Rosita. 2011. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Untuk Menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dengan Persepsi Kemanfaatan Dan Sikap Atas Penggunaan Sebagai Variabel Antara (Studi Pada SKPD Kota Solok)*. Skripsi. FE UNP

LAMPIRAN

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Y	50	41	55	48.58	3.780

X1	50	34	45	39.46	3.092
X2	50	28	40	36.90	3.677
X3	50	43	75	64.30	8.264
Valid N (listwise)	50				

2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.77963740
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.083
	Negative	-.178
Kolmogorov-Smirnov Z		1.257
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085

a. Test distribution is Normal.

b. Uji Multikolenaritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.621	1.611
	X2	.671	1.490
	X3	.898	1.113

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

c. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-2.244	2.984		-.752	.456
	X1	.081	.089	.166	.909	.368
	X2	.039	.072	.095	.541	.591
	X3	.000	.028	-.005	-.032	.974

a. Dependent

Variable: RES2

3. Hasil Analisis Data

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.678 ^a	.459	.424	2.869

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.340	5.660		2.534	.015
	X1	.607	.168	.496	3.607	.001
	X2	.039	.136	.038	.284	.778
	X3	.138	.052	.301	2.635	.011

a. Dependent Variable: Y

c. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	321.587	3	107.196	13.025	.000 ^a
	Residual	378.593	46	8.230		
	Total	700.180	49			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y